

## BAHAN AJAR PERTEMUAN 3

### Periode 1500 - 1899

#### 1517: Perpisahan umat beriman

Zaman reformasi mulai di Wittenberg pada saat Martin Luther (1483- 1546) mengumumkan ke-95 tesisnya yang menentang praktik pengampunan denda dosa dalam Gereja Katolik. →

Kendati demikian, kata Reformasi sendiri pertama-tama muncul dari gerakan pembaruan di kalangan Gereja Kristen di Eropa Barat pada abad ke-16, yang dipimpin oleh Martin Luther, Ulrich Zwingli, Yohanes Calvin, dll

**Martin Luther** (lahir di Eisleben, Kekaisaran Romawi Suci, 10 November 1483 – meninggal di Eisleben, Kekaisaran Romawi Suci, 18 Februari 1546 pada umur 62 tahun) adalah seorang pastur Jerman dan ahli teologi Kristen dan pendiri Gereja Lutheran, gereja Protestan, pecahan dari Katolik Roma. Dia merupakan tokoh terkemuka bagi Reformasi. Ajaran-ajarannya tidak hanya mengilhami gerakan Reformasi, namun juga mempengaruhi doktrin, dan budaya Lutheran serta tradisi Protestan. Seruan Luther kepada Gereja agar kembali kepada ajaran-ajaran Alkitab telah melahirkan tradisi baru dalam agama Kristen. Gerakan pembaruannya mengakibatkan perubahan radikal juga di lingkungan Gereja Katolik Roma dalam bentuk Reformasi Katolik. Sumbangan-sumbangan Luther terhadap peradaban Barat jauh melampaui kehidupan Gereja Kristen. Terjemahan Alkitabnya telah ikut mengembangkan versi standar bahasa Jerman dan menambahkan sejumlah prinsip dalam seni penerjemahan. Nyanyian rohani yang diciptakannya mengilhami perkembangan nyanyian jemaat dalam Gereja Kristen. pernikahannya pada 13 Juni 1525 dengan Katharina von Bora menimbulkan gerakan pernikahan pendeta di kalangan banyak tradisi Kristen.



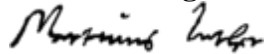
Luther di tahun 1529 oleh Lucas Cranach

<b>Lahir</b>	<u>10 November 1483</u> <u>Eisleben, Kekaisaran Romawi</u> <u>Suci</u>
<b>Meninggal</b>	<u>18 Februari 1546</u> (umur 62) <u>Eisleben, Kekaisaran Romawi</u> <u>Suci</u>
<b>Pekerjaan</b>	Theolog, pendeta
<b>Keyakinan agama</b>	<u>Lutheran</u> (sebelumnya <u>Katolik Roma</u> )
<b>Suami/Istri</b>	<u>Katharina von Bora</u>

**Anak** Hans, Elizabeth, Magdalena,  
Martin, Paul, Margarethe

**Kerabat** Hans Luther dan Margarethe Luther (née Lindemann)

**Tanda tangan**



Martin Luther (10 November 1483 - 18 Februari 1546) dilahirkan dari ayahnya Hans (aslinya **Hans Luder**) dan Margarette Lindemann, di Eisleben, Jerman, dan dibaptiskan pada hari raya St. Martin dari Tours. Karena itu ia diberi nama *Martin*. Ayahnya memiliki tambang tembaga di Mansfeld yang tidak jauh dari rumahnya. Karena berhasil berkembang dari kalangan buruh tani, ayahnya bertekad bahwa anaknya harus menjadi pegawai negeri dan memberikan kehormatan kepada keluarganya. Dengan harapan itulah Hans mengirimkan Martin yang masih kecil untuk belajar di Mansfeld, Magdeburg dan Eisenach.

Pada usia 17 tahun, di tahun 1501, Luther masuk ke Universitas Erfurt. Mahasiswa yang muda ini mendapatkan gelar sarjananya pada 1502, dan gelar magisternya pada 1505. Mengikuti harapan ayahnya, Luther mendaftarkan diri di sekolah hukum di universitas itu.

Semuanya itu berubah ketika pada suatu hari di musim panas tahun 1505, saat terjadi serangan badai. Petir menyambar di dekatnya ketika ia sedang berjalan pulang dari sekolah. Dalam ketakutan, ia berseru, "Tolonglah, Santa Ana! Saya akan menjadi biarawan!" Seruan ini dikarenakan kepercayaan saat itu akan santa dan santo. Karena nyawanya selamat, Luther meninggalkan sekolah hukumnya dan masuk ke biara Augustinian di Erfurt. Bisa dibayangkan betapa marah ayahnya kepada Martin, karena ayahnya menginginkan ia menyelesaikan studi hukumnya.



"Rumah Luther", asrama tempat tinggal Luther dari usia 14-17 tahun ketika belajar di sekolah swasta di Eisenach.

### **Pergumulan Luther untuk mendapatkan kedamaian bersama Allah**

Biarawan muda Martin Luther sepenuhnya mengabdikan dirinya pada kehidupan biara, berusaha melakukan segala perbuatan baik untuk menyenangkan Allah dan melayani orang lain melalui doa-doa untuk jiwa-jiwa mereka. Ia mengabdikan diri dengan puasa, menyiksa diri, berdoa selama berjam-jam, melakukan ziarah, dan terus-menerus melakukan pengakuan dosa. Semakin ia berusaha untuk Allah tampaknya ia semakin sadar akan keberadaannya yang penuh dengan dosa.

Johann von Staupitz, atasan Luther, menyimpulkan bahwa orang muda ini membutuhkan lebih banyak pekerjaan untuk mengalihkannya dari rasa kuatirnya yang berlebihan. Ia memerintahkan biarawan itu untuk mengembangkan kariernya sebagai akademisi. Pada 1507 Luther ditahbiskan menjadi imam. Pada 1508 ia mulai mengajar teologi di Universitas Wittenberg. Luther mendapatkan gelar sarjananya dalam Studi Alkitab pada 9 Maret 1508, dan gelar sarjananya dalam Sentences karya Petrus Lombardus (buku ajar teologi yang terutama pada Zaman

Pertengahan), pada 1509. Pada 9 Oktober 1512, Martin Luther menerima gelar Doktor Teologinya dan pada 21 Oktober 1521, ia "diterima menjadi anggota senat dosen teologi" dan diangkat menjadi *Doktor dalam Kitab Suci*.



### **Teologi Luther tentang anugerah**

Disiplin yang sangat ketat untuk mendapatkan gelar-gelar akademik dan mempersiapkan kuliah-kuliah, mendorong Martin Luther untuk mempelajari Kitab Suci secara mendalam. Karena terpengaruh oleh seruan Humanisme ad fontes ("kembali ke sumbernya"), Luther menenggelamkan dirinya dalam mempelajari Alkitab dan Gereja perdana. Dengan segera istilah-istilah seperti penyesalan dan pembenaran mendapatkan makna yang baru bagi Luther. Ia menjadi yakin bahwa Gereja telah keliru dalam beberapa kebenaran sentral dari Kekristenan yang diajarkan dalam Kitab Suci -- yang terpenting di antaranya adalah doktrin tentang pembenaran oleh iman semata. Luther mulai mengajarkan bahwa keselamatan sepenuhnya adalah pemberian dari anugerah Allah melalui Kristus yang diterima oleh iman.

Belakangan, Luther mendefinisikan dan memperkenalkan kembali prinsip tentang perbedaan yang semestinya antara Hukum Taurat dan Injil yang mendasari teologinya tentang anugerah. Secara keseluruhan, Luther percaya bahwa prinsip penafsiran ini merupakan titik awal yang penting dalam mempelajari Kitab Suci. Luther melihat kegagalan untuk membedakan Hukum Taurat dan Injil yang semestinya sebagai sumber penghalang Injil Yesus di Gereja pada masanya, yang pada gilirannya menyebabkan munculnya berbagai kesalahan teologis yang dasariah.

### **Pertikaian indulgensia**

Selain tugas-tugasnya sebagai seorang profesor, Martin Luther melayani sebagai pengkhotbah dan penerima pengakuan dosa di Gereja Kastil, "fondasi" dari Frederick yang Bijak, Pemilih dari Saxony. Gereja ini dinamai "Semua orang Suci" karena di sinilah disimpan koleksi relikui sucinya. Gereja ini berfungsi sebagai biara Augustinian dan universitas. Dalam melakukan tugas-tugas inilah pastor muda itu diperhadapkan dengan berbagai akibat yang timbul ketika orang biasa harus mendapatkan indulgensia.

Indulgensia adalah penghapusan (sepenuhnya atau sebagian) dari penghukuman sementara yang masih ada bagi dosa-dosa setelah kesalahan seseorang dihapuskan melalui absolusi (pernyataan oleh imam bahwa dosa seseorang telah dihapuskan). Saat itu terjadi penyalahgunaan indulgensia oleh oknum-oknum Gereja, yaitu sebuah indulgensia dapat dibeli seorang umat untuk dirinya sendiri ataupun untuk salah seorang sanak keluarga yang sedang berada di api penyucian. Johann Tetzel, seorang imam Dominikan, ditugasi berkeliling di seluruh wilayah keuskupan Uskup Agung Albert dari Mainz untuk mempromosikan dan menjual indulgensia untuk merenovasi Basilika St. Petrus di Roma. Tetzel sangat berhasil dalam hal ini. Ia menganjurkan: "Begitu mata uang bergemerincing di dalam kotak, jiwa yang sedang menanti di api penyucian pun akan terlepas" <sup>[1]</sup>.

Luther menganggap penjualan indulgensia ini sebagai penyelewengan yang dapat menyesatkan umat sehingga mereka hanya mengandalkan indulgensia itu saja dan mengabaikan pengakuan dosa dan pertobatan sejati. Luther menyampaikan tiga khotbah menentang indulgensia ini pada 1516 dan 1517. Pada 31 Oktober 1517, menurut laporan tradisional, 95 dalil Luther dipakukan pada pintu Gereja Kastil sebagai undangan terbuka untuk memperdebatkannya<sup>21</sup>. Luther sebetulnya tidak menempatkan ke-95 dalil itu di pintu Gereja Wittenberg sebagaimana dikatakan legenda, tetapi menerbitkan salinannya.

Dalil-dalilnya ini mengutuk keserakahan dan keduniawian di dalam Gereja dan dianggap sebagai penyimpangan. Luther mengeluarkan bantahan teologis tentang apa yang dapat dihasilkan oleh indulgensia itu. Luther tidak menantang wewenang paus untuk mengeluarkan indulgensia dalam dalil-dalilnya itu. ke-95 dalil Luther segera diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, disalin dan dicetak secara luas. Dalam waktu dua minggu, dalil-dalilnya telah menyebar ke seluruh Jerman, dan dalam waktu dua bulan ke seluruh Eropa. Ini adalah salah satu peristiwa pertama dalam sejarah yang dipengaruhi secara mendalam oleh mesin cetak, yang membuat distribusi dokumen lebih mudah dan meluas.

### Jawaban Paus



Bila cetakan kayu ini dibalikkan, kita dapat melihat bagaimana pandangan lawan-lawan Luther terhadapnya.

Setelah meremehkan Luther sebagai "seorang Jerman mabuk yang menulis dalil-dalil itu" yang "bila ia kembali sadar, ia akan berubah pikiran," Paus Leo X memerintahkan Sylvester Mazzolini, seorang profesor teologi Dominikan, yang juga dinamai Prierias (atau Prieras), sesuai dengan nama tempat kelahirannya Priero, pada 1518, untuk menyelidiki masalahnya. Prierias mengenali perlawanan Luther yang tersirat terhadap kewibawaan paus karena berbeda pendapat dengan bula kepausan. Karena itu ia menyatakan Luther sebagai penyesat, dan menulis bantahan ilmiah terhadap dalil-dalilnya. Bantahan ini menegaskan kewibawaan paus terhadap Gereja dan menolak setiap penyimpangan daripadanya yang dianggap sebagai ajaran sesat. Luther menjawab dalam cara yang sama, sehingga berkembanglah suatu pertikaian.

Sementara itu, Luther ikut serta dalam sebuah pertemuan biarawan Augustinian di Heidelberg. Di sana ia menyajikan tesisnya tentang perbudakan manusia di dalam dosa dan tentang anugerah ilahi. Dalam pertikaian mengenai indulgensia, muncullah pertanyaan tentang kekuasaan dan wewenang mutlak paus, karena doktrin tentang "Khazanah Gereja," "Khazanah Jasa," yang mendasari doktrin dan praktik indulgensia, didasarkan pada Bula Unigenitus (1343) dari Paus Clemens VI. Karena perlawanannya terhadap doktrin itu, Luther dicap sesat, dan paus, yang telah bertekad untuk menekan pandangan-pandangannya, memanggilnya ke Roma.

Namun karena mengalah kepada Frederick sang Pemilih, yang diharapkan oleh Paus akan menjadi Kaisar Romawi Suci berikutnya dan yang tidak rela berpisah dengan teologinya, Paus tidak menekan masalahnya lebih jauh. Kardinal Kayetanus diutus Paus untuk menerima janji ketaatan Luther di Augsburg (Oktober 1518).

Luther, meskipun secara tersirat mengaku taat kepada Gereja, kini dengan berani menyangkal kewibawaan Paus, dan naik banding pertama-tama "dari Paus yang kurang pengetahuan kepada Paus yang mestinya lebih tahu" dan kemudian (28 November) kepada konsili umum. Luther kini menyatakan bahwa lembaga kepausan bukanlah bagian dari hakikat Gereja yang asli dan yang tidak dapat berubah.

Karena ingin tetap memelihara hubungan baik dengan Luther, Paus membuat upaya terakhir untuk menyelesaikan konfliknya dengan Luther secara damai. Sebuah konferensi dengan pejabat tinggi kepausan, Karl von Miltitz di Altenburg pada January 1519 membuat Luther sepakat untuk berdiam diri selama lawan-lawannya pun demikian, menulis sebuah surat yang rendah hati kepada Paus, dan menyusun sebuah risalat yang membuktikan rasa hormatnya kepada Gereja Katolik. Surat itu ditulis, namun tidak pernah dikirim, karena tidak mengandung pernyataan bahwa Luther menarik ajaran-ajarannya. Dalam risalat bahasa Jerman yang ditulisnya belakangan, Luther, meskipun mengakui api penyucian, indulgensia, dan pemanggilan kepada orang-orang kudus, menolak seluruh manfaat indulgensia terhadap api penyucian.

Ketika Johann Eck menantang rekan Luther, Carlstadt, untuk berdebat di Leipzig, Luther bergabung di situ (27 Juni–18 Juli 1519). Sementara debat berlangsung Luther menyangkal hak ilahi jabatan dan wewenang kepausan, dan berpendapat bahwa "kuasa atas kunci-kunci itu" telah diserahkan kepada Gereja (yaitu, jemaat yang setia). Ia menyangkal bahwa keanggotaan dalam Gereja Katolik Barat di bawah Paus merupakan prasyarat bagi keselamatan, dan berpegang pada keabsahan Gereja (Ortodoks) Yunani. Setelah perdebatan itu, Johann Eck mengklaim bahwa ia telah memaksa Luther untuk mengakui bahwa doktrinnya sama dengan doktrin Jan Hus yang telah dihukum mati dengan dibakar. Eck menganggap bahwa hal ini membuktikan klaimnya sendiri bahwa Luther adalah "si Hus dari Saxon" dan gembong penyesat.

Luther memberi judul (dalam bahasa Inggris) *The Disputation of Doctor Martin Luther on the Power and Efficacy of Indulgences*, dan mengkritik dalamnya ajaran Gereja barat mengenai asas menghapuskan dosa, kuasa Paus dan lain sebagainya.

Kajian mengenai Surat Paulus, terutamanya surat kepada jemaat di Roma memberikan kesan kepada Luther akan asas *sola fide* (hanya karena iman). Hanya imanlah yang dapat menyelamatkan manusia yang diberikan Tuhan berdasarkan anugerahnya (*sola gratia*) kepada manusia seperti yang dijelaskan menurut Alkitab (*sola scriptura*). Luther sangat menentang ajaran gereja pada saat itu yang dianggapnya menawarkan keselamatan dengan murah dengan cara menjual surat-surat penghapusan dosa (*indulgensia*).

Pada mulanya Luther percaya bahwa dia akan dapat memperbaiki Gereja Roma dari dalam dengan dalil-dalilnya tetapi Paus menganggap pendapatnya sesat dan mengucilkannya (ekskomunikasi dari Gereja Katolik dengan akta *Exsurge Domine* pada tanggal 15 Juni 1520). Pada Oktober Luther membakar ijazahnya di tempat umum dan menunjukkan kesungguhannya bahwa dia tidak akan taat kepada Gereja kecuali mereka menurut kata-katanya.

Kaisar Charles V meresmikan persidangan *imperial Diet of Worms* pada 22 Januari 1521. Ini merupakan peluang terakhir Luther untuk mengakui bahwa apa yang diajarkannya adalah salah. Namun Luther tetap mempertahankan ajarannya. Selepas persidangan Diet, Luther dinyatakan sebagai orang buangan oleh Diet.

Dengan bantuan rekannya, Luther bermukim di balaikota Wartburg, berdekatan dengan Erfurt. Dalam balaikota tersebut, dia menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru dari bahasa Yunani ke bahasa Jerman. Kemudian dia juga menerjemahkan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Jerman. Luther mengasaskan ajarannya sendiri dengan rekannya Philip Melancton dan meninggal pada tahun 1546.

### **Keluarga**

Luther menikah dengan Katharina von Bora, seorang mantan biarawati, pada 13 Juni 1525. Pasangan ini mendapatkan enam orang anak, tiga laki-laki dan tiga perempuan:

Hans, lahir pada 7 Juni 1526, belajar hukum, menjadi pejabat hukum dan meninggal pada 1575.

Elizabeth, lahir pada 10 Desember 1527 dan meninggal pada usia sangat muda pada 3 Agustus 1528.

Magdalena, lahir 5 Mei 1529, meninggal di dalam pelukan ayahnya pada 20 September 1542. Kematiannya merupakan pukulan yang sangat hebat bagi Luther dan Katharina.

Martin, Jr., lahir 9 November 1531, belajar teologi tetapi tidak pernah dipanggil menjadi pendeta hingga ia meninggal pada 1565.

Paul, lahir 28 Januari 1533, menjadi dokter. Ia mempunyai enam orang anak hingga ia meninggal pada 1593. Garis keturunan laki-laki keluarga Luther berlanjut melalui dia kepada John Ernest, yang berakhir pada 1759.

Margaretha, lahir 17 Desember 1534, menikah dengan George von Kunheim, keturunan keluarga bangsawan Persia yang kaya, tetapi meninggal pada 1570 pada usia 36 tahun. Keturunannya berlanjut hingga sekarang.

====//====

**Huldrych** (atau **Ulrich**) **Zwingli** (lahir di Wildhaus, St. Gall, Swiss, 1 Januari 1484 – meninggal 11 Oktober 1531 pada umur 47 tahun) adalah pemimpin Reformasi Swiss, dan pendiri Gereja Reformasi Swiss. Zwingli adalah seorang *doctor biblicus* (pakar Alkitab) yang independen dari Luther. Ia tiba pada kesimpulan-kesimpulan yang sama setelah meneliti Kitab Suci dari sudut pandangan seorang sarjana humanis.

Zwingli dilahirkan di Wildhaus, St. Gall, Swiss dari sebuah keluarga kelas menengah terkemuka. Ia adalah anak ke-3 dari delapan anak lelaki. Ayahnya, Ulrich, adalah hakim kepala di kotanya, dan pamannya, Bartolomeus seorang pendeta.

Reformasi Zwingli didukung oleh pemerintah dan penduduk Zürich, dan menyebabkan perubahan-perubahan penting dalam kehidupan masyarakat, dan urusan-urusan negara di Zürich. Gerakan ini, khususnya, dikenal karena tanpa mengenal kasihan menganiaya kaum Anabaptis dan para pengikut Kristus lainnya yang mengambil sikap tidak melawan. Reformasi menyebar dari Zürich ke lima kanton Swiss lainnya, sementara yang lima lainnya berpegang kuat pada pandangan iman Gereja Katolik.

Zwingli terbunuh di Kappel am Albis, dalam sebuah pertempuran melawan kanton-kanton Katolik.

## **Sumbangan Zwingli bagi Reformasi**

### **Latar belakang**

Sementara orang dapat menemukan banyak sekali informasi mengenai teologi Martin Luther, Yohanes Calvin, dan lainnya, relatif sedikit sekali yang dapat ditemukan tentang Ulrich Zwingli. Karena masa hidup Zwingli berbarengan dengan masa hidup Luther, dan karena Zwingli menolak taubatan imam Katolik Roma hanya beberapa tahun setelah Luther, tampaknya Zwingli telah dibayang-bayangi oleh sumbangan Luther dan Calvin terhadap Reformasi.

Alasan lain yang membuat karier Zwingli kurang kelihatan mungkin adalah perbedaan-perbedaan teologinya sendiri dibandingkan dengan Luther. Sebagian orang percaya bahwa karena perbedaan-perbedaan ini para penulis sejarah dan aktivis agama, yang lebih bersimpati dengan pandangan-pandangan doktriner Luther, mungkin ikut menekan pandangan-pandangan doktriner Zwinglin. Mereka berpendapat, "pihak yang menang dalam sejarah itulah yang menulis sejarah", karena itu "sisi lain dari ceritanya" terlupakan atau disingkirkan.

### **Teologi: sakramen dan perjanjian (Zwingli versus Luther)**

Menurut E. Brooks Holifield, "Ketika Luther menyebut sakramen sebagai meterai perjanjian, yang ia maksudkan ialah bahwa baptisan secara kelihatan mengesahkan dan menjamin janji-janji Allah, sebagaimana sebuah meterai kerajaan mengesahkan dokumen pemerintah yang tertulis di dalamnya. Hanya secara sekunder baptisan itu dipahami sebagai janji ketaatan oleh manusia. Namun bagi Zwingli, sakramen terutama adalah 'suatu tanda perjanjian yang menunjukkan bahwa semua yang menerimanya rela memperbaiki hidupnya untuk mengikut

Kristus." (Holifield, "The Covenant Sealed: The Development of Puritan Sacramental Theology in Old and New Testaments" (1570-1720, New Haven, Conn.: Yale University press, 1974, 6).

Zwingli juga percaya bahwa sakramen Kristen itu serupa dengan janji atau sumpah seorang militer untuk membuktikan kerelaan dirinya untuk mendengarkan dan menaati firman Allah.

Lihat *Memorialisme*.

### **Musik di Gereja**

Zwingli adalah orang Protestan pertama yang membuang penggunaan alat musik dalam kebaktian. Malahan Zwingli begitu kuatir akan penyalahgunaan musik sehingga, demikian pandangannya, sebagian dari kebaktian yang dipimpinnya sama sekali tidak menggunakan musik. Ia merasa bahwa alat musik itu suatu pelanggaran, sambil mengutip bapak-bapak gereja kuno untuk mendukung pernyataannya. Zwingli berusaha kembali ke praktek yang diikuti oleh kebanyakan gereja Ortodoks Timur bahkan hingga di masa kini. Namun lebih dari mereka, ia menganggap musik dapat mengalihkan perhatian orang dari pemberitaan firman Allah. Banyak pengikut gerakan Reformasi ini setuju dengan pelarangan alat-alat musik di Gereja, namun tidak ada seorangpun yang setuju bahwa musik harus dihapuskan sama sekali. Orgel, khususnya, dikecam oleh para pemimpin Gereja Reformasi, karena dianggap sebagai contoh yang paling jelas dari apa yang mereka maskudkan dengan kerusakan yang dibiarkan masuk oleh Gereja Katolik Roma ke dalam ibadah. Zwingli menganjurkan agar alat musik itu dijual saja serta hasilnya diberikan kepada kaum miskin. Kebencian terhadap alat-alat musik oleh kelompok Reformasi ini, yang pertama-tama dianut oleh Zwingli, kadang-kadang menjadi batu ganjalan yang menghalangi kerjasama dengan kaum Lutheran yang kaya dengan musik.

Nyanyian di gereja yang tidak disertai musik hingga kini menjadi ciri khas dari sejumlah cabang dari Gereja Presbyterian, dan beberapa Gereja Reformasi. Kaum Baptis Primitif juga melakukan praktik ini. Mereka percaya bahwa penggunaan alat musik berkaitan dengan ibadah Perjanjian Lama di Bait Suci Yerusalem, sebuah bentuk ibadah yang ditetapkan oleh Allah, tetapi kini telah dihapuskan setelah Allah membangkitkan Kristus dari kematian, dan mendirikan Gereja dengan mengutus Roh Kudus-Nya.

### **Kehidupan Zwingli**

#### **Masa muda**

Zwingli mendapatkan pendidikan awalnya di Weesen di bawah bimbingan pamannya Bartolomeus, yang pindah dari Wildhaus. Sebelum masuk ke Universitas Wina Zwingli menyelesaikan studinya di Bern. Ia mendaftarkan diri di Wina pada 1498, dan setelah dikeluarkan selama setahun, Zwingli melanjutkan studinya di sana hingga 1502. Saat itu ia pindah ke Universitas Basel, untuk mengambil gelar sarjananya 1504, dan kemudian Sarjana Teologinya pada 1506.

#### **Menjadi imam**

Tepat sebelum ia mendapatkan gelar teologinya, Zwingli menjadi pastur di Glarus, dan tinggal di sana selama sepuluh tahun. Pada waktu itulah Zwingli menyempurnakan kemampuan bahasa Yunaninya, dan mengambil bahasa Ibrani. Selain mempelajari bahasa-bahasa Alkitab, ia juga membaca karya Erasmus, yang memberikannya perspektif humanis.

Penggunaan tentara bayaran Swiss adalah sesuatu yang lazim terjadi di Eropa pada abad ke-16 dan hal ini sangat ditentang Zwingli, kecuali bila hal itu diperintahkan oleh paus. Kendati demikian, Zwingli menerima pekerjaan pendeta tentara pada beberapa kesempatan, ketika para pemuda dari jemaatnya pergi ke Italia sebagai tentara bayaran. Meskipun demikian, perlawanan Zwingli terhadap tugas militer di luar negeri dan reputasinya yang kian berkembang sebagai seorang pengkhabah yang baik dan sarjana yang cerdas membuat ia terpilih pada 1518 menjadi imam di Gereja Grossmünster di Zürich. Saat itu ia telah menjadi pastur di Einsiedeln selama dua tahun.

Kesediaan Zwingli untuk meninggalkan Glarus semakin meningkat dengan berkembangnya semangat pro-Prancis di sana, apalagi pada waktu itu Zwingli sangat memihak kepada Paus.



Tulisan-tulisan Zwingli sewaktu tinggal di Glarus menjadikan kardinal Swiss Mattias Schinner sahabatnya, dan memberikannya tunjangan tahunan dari Roma.

### **Terasing dari Gereja**

Baru pada saat ia menjadi pastur di Gereja Grossmünster, Zwingli mulai secara terbuka mempertanyakan dogma Gereja Katolik Roma. Ia sendiri mengaku bahwa ia sudah mempertanyakannya sebelumnya, namun tidak ada fakta-fakta yang mendukungnya. Zwingli selalu mengaku tidak tahu-menahu tentang apa yang ditulis Luther, dan bahwa ia ikut serta dalam memulai Reformasi di Swiss terpisah dari Luther. Ketika seorang pengkhotbah tentang indulgensia muncul di Zürich pada 1519, Zwingli melawannya. Ini terjadi dua tahun setelah Luther menentang praktik indulgensia ini dengan 95 dalilnya.



### **Gereja Grossmünster di Zürich**

Baru pada tahun 1520 Zwingli menolak tunjangannya dari paus. Kemudian ia menyerang sistem tentara bayaran, dan meyakinkan Zürich, satu-satunya dari semua kanton di Swiss, untuk menolak aliansi dengan Prancis pada 5 Mei 1521. Pada 11 Januari 1522, semua pengiriman tentara ke luar negeri dan tunjangan asing dilarang di Zürich.

Dengan keberhasilan Zwingli sebagai seorang politikus, yang didorong oleh upaya-upaya sosialnya pada masa wabah tahun 1520, gengsi dan kedudukannya makin meningkat. Sejak 1522 ia mulai melakukan pembaruan Gereja dan iman Kristen. Tulisan reformasinya yang pertama, "Vom Erkiesen und Fryheit der Spysen", diterbitkan di tengah-tengah pertikaian mengenai hukum gereja tentang puasa. Zwingli menegaskan bahwa perintah berpuasa hanyalah aturan-aturan manusia, tidak sejalan dengan Kitab Suci, dan kini Zwingli yakin bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber bagi iman. Ia menyatakan hal ini dalam "Archeteles."

### **Pernikahan**

Kapan hubungan intim mereka melampaui batas tidak diketahui, tetapi pada musim semi 1522 Zwingli dan Anna Reinhard hidup bersama dalam apa yang disebut "pernikahan klerus." Hubungan pergundikan seperti itu cukup lazim saat itu, karena ada anggapan bahwa tanpa dukungan karunia ilahi yang luar biasa tidak mungkin seorang imam hidup dalam kesucian mutlak. Pada kenyataannya memang sedikit sekali yang melakukannya. Zwingli pada akhirnya menikahi Anna pada 2 April 1524. Antara 1526 dan 1530 pasangan ini mempunyai empat orang anak.



### **Reformasi di Zürich**

Setelah tiga tahun berkhotbah, Zwingli mempersiapkan 67 dalil ("*Schlussreden*"), yang dimaksudkan untuk khalayak umum dibandingkan dengan dalil Luther dan mencakup semua pokok tentang "Injil", sebagaimana yang disebutnya. Sesuai dengan kebijakan agama di Swiss pada waktu itu, harus diadakan perdebatan publik sebelum langkah-langkah radikal diambil menyangkut masalah-masalah agama. Diadakanlah sebuah pertemuan di Zürich 29 Januari 1523, yang dipimpin oleh walikota. Semua pastor diundang. Perdebatan yang sungguh-sungguh tidak terjadi, hanya dialog antara Zwingli dan vikaris jenderal dari Konstanz. Dewan Kota memutuskan bahwa doktrin-doktrin yang telah diajarkan Zwingli itu harus diberlakukan di kanton Zürich.

Para pengikut Zwingli yang radikal memanfaatkan situasinya. Mereka membuang semua patung dan gambar dari gereja-gereja, mengubah bahasa liturgis dari kebaktian-kebaktian, dan membuang segala tambahan yang ada pada misa, dan berusaha sejauh mungkin untuk mengembalikannya kepada yang paling dasar. Pada akhir 1524 biara bagi laki-laki maupun perempuan dihapuskan, dan musik dibungkam di gereja. Namun masyarakat tidak berubah, karena Zwingli enggan mengubah sesuatu yang sudah begitu lama terpaut dengan kehidupan orang banyak, sebelum mereka sepenuhnya siap untuk menerima gantinya.

Setidak-tidaknya dinayatakan bahwa pada hari Kamis pada Minggu Suci, 13 April 1525, di Gereja Grossmunster, Perjamuan Kudus untuk pertama kalinya akan diselenggarakan mengikuti liturgi yang telah disusun Zwingli. Pada hari yang bersejarah itu, laki-laki dan perempuan duduk berseberangan dengan sebuah meja memanjang di antara keduanya dan dilayani dengan roti di piring-piring kayu serta anggur dari cawan kayu. Kontras dengan kebiasaan sebelumnya sangat mengejutkan banyak orang, namun cara yang baru itu diterima. Dengan keputusan yang radikal dengan masa lalu ini Reformasi di Zürich pun selesai. Dalam tahun yang sama, Zwingli disapa dengan gelar kehormatan Antistes.

### **Tahap politik**

Doktrin-doktrin baru diperkenalkan dan menghadapi perlawanan. Lawan-lawan pertama yang dihadapi para Reformator ini datang dari pihak mereka sendiri. Para petani tidak dapat menemukan alasan di dalam Alkitab, prinsip iman mereka satu-satunya, mengapa mereka harus membayar kepada para tuan mereka pajak, persepuluhan dan uang sewa. Mereka menolaknya. Masyarakat menjadi gelisah di mana-mana, dan baru menjadi tenang kembali setelah perundingan yang lama dan dengan konsesi dari Pemerintah.

Kaum Anabaptis tidak begitu mudah ditenangkan. Dari penafsiran Alkitab mereka, yang telah diberikan Zwingli ke tangan mereka, mereka menentang baptisan anak dan menolak bergabung dengan gereja negara Zwingli. Karena itu Zwingli mengganjar mereka tanpa kasihan dengan penjara, siksaan, pembuangan dan bahkan hukuman mati. Salah seorang pemimpin mereka Felix Manz ditenggelamkan. Perang melawan kaum Anabaptis jauh lebih serius bagi Zwingli daripada melawan Roma.

Di St. Gallen walikota Vadian (Joachim von Watt) berhasil memenuhi keinginan Zwingli -- di Schaffhausen, Dr. Sebastian Hofmeister melakukan hal yang sama; di Basel Johann Oecolampadius. Zwingli sendiri datang ke Bern, pada Januari 1528. Doktrin-doktrin yang baru kemudian diperkenalkan dengan cepat ke Bern, seperti yang terjadi di Zürich, dan banyak tempat dan kecamatan yang sebelumnya ragu-ragu kini mengikuti teladan ini. Zwingli juga dapat menunjuk kepada keberhasilan cemerlang pada 1528 dan 1529. Ia meyakinkan bahwa pembaruannya akan menang melalui "Hak-hak Sipil Kristen", yang disetujui antara Zürich dan kota-kota Konstanz (1527), Bern dan St. Gall (1528), Biel, Mulhausen, dan Schaffhausen (1529).

## Reaksi



Patung Zwingli di Zürich

Reformasi menyapu di seluruh Swiss. Namun kanton-kanton Uri, Schwyz, Unterwalden, Lucerne, Zug, dan Fribourg tetap setia kepada Iman yang lama, dan memberikan perlawanan gigih terhadap Zwingli. Ini tidak berarti bahwa kanton-kanton Katolik sepenuhnya puas dengan kondisi-kondisi yang berlaku di Gereja Katolik. Mereka berusaha menghapuskan penyelewengan, menerbitkan Konkordat Iman pada 1525 yang menuntut pembaruan-pembaruan penting. Namun semua ini tidak digubris. Dari 21 Mei hingga 8 Juni 1526, mereka mengadakan perdebatan terbuka di Baden, dan di situ mereka mengundang Dr. Johann Eck dari Ingolstadt. Zwingli tidak muncul.

Di Baden, sebuah tempat terkenal, hanya 18 km di barat laut Zürich, terjadi pertikaian antara wakil-wakil Gereja Lama dengan kelompok Zwingli dari 21 Mei hingga 8 Juni 1526. Meskipun tidak hadir secara pribadi, Zwingli mempunyai hubungan yang akrab dengan mereka yang berasal dari Zürich yang berbicara atas nama dirinya, dan memberikan kepada mereka instruksi harian. Sudah tentu masing-masing pihak mengklaim dirinya menang.

Untuk memaksa kanton-kanton Katolik menerima doktrin-doktrin yang baru, Zwingli bahkan menganjurkan perang saudara, menyusun rencana peperangan, dan berhasil membujuk Zürich untuk menyatakan perang dan maju ke wilayah-wilayah Katolik. Distrik-distrik Katolik pada saat itu telah memperkuat posisi mereka dengan membangun aliansi pertahanan dengan Austria (1529), "Persatuan Kristen". Namun pada titik ini mereka tidak memperoleh bantuan. Bern membuktikan dirinya lebih moderat daripada Zürich, dan perjanjian perdamaian pun disusun, namun isinya sangat tidak menguntungkan pihak Katolik.

### **Diktator Zürich**

Di Zürich, Zwingli adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam masalah gereja maupun politik. Dia merangkap "walikota, sekretaris, dan dewan kota" sekaligus. Rasa percaya dirinya yang terus bertumbuh menghalangi suatu persetujuan dengan Luther menyangkut doktrin tentang Perjamuan Kudus ketika direncanakan perdebatan antara kedua pemimpin Protestan ini di Marburg pada Oktober 1529.

Sebagai negarawan, Zwingli terjun ke politik sekular dengan rencana yang ambisius, "Dalam tiga tahun," tulisnya, "Italia, Spanyol dan Jerman akan mengambil pandangan kita." Dengan melarang kompromi apapun dengan kanton-kanton Katolik Zwingli tampaknya telah mendorong mereka untuk mengangkat senjata. Pada 9 Oktober 1531, mereka menyatakan perang melawan

Zürich, dan maju ke perbatasan Kappel. Hari itu ternyata adalah hari yang sangat menentukan bagi Zwingli.

### **Perang saudara dan kematian Zwingli di medan tempur**

Lihat Perang Kappel, Reformasi di Swiss.

Konfederasi Swiss bukanlah sebuah negara yang tersentralisasi, tetapi banyak negara atau kanton yang hanya dipersatukan dalam beberapa masalah saja, terutama keinginan mereka untuk merdeka dari Jerman. Ketika kanton-kanton Katolik mengambil langkah untuk membangun aliansi dengan Karl V, Zwingli menganjurkan agar kanton-kanton Protestan mulai mengambil inisiatif militer sebelum terlambat. Zwingli mempersiapkan perang, tetapi keyakinannya tidak diikuti oleh semua kanton Protestan lainnya. Sebaliknya, kaum Protestan lainnya mengambil langkah-langkah ekonomi terhadap kanton-kanton Katolik. Pada Oktober 1531, lima kanton Katolik bergabung dalam sebuah serangan dadakan atas Zürich. Kaum Protestan hampir tidak bisa mempertahankan diri karena tidak ada peringatan lebih awal, tetapi ketika pasukan mereka akhirnya berkumpul, Zwingli maju dengan pasukan-pasukan yang pertama, dan terbunuh di medan tempur. Di Kappel, pasukan Zürich dikalahkan dan sebulan kemudian, Perdamaian Kappel ditandatangani.

### **Pengganti Zwingli**

Pengganti Zwingli, Heinrich Bullinger, dipilih pada 9 Desember 1531, untuk pendeta Gereja Grossmünster di Zürich, sebuah posisi yang dijabatnya hingga akhir hayatnya (1575). Ia tidak menggantikan Zwingli sebagai pemimpin politik kanton itu. Pendeta Grossmünster tetap memiliki pengaruh politik, tetapi masa teokrasi untuk Zürich sudah berlalu.

### **Tokoh-tokoh Reformasi Swiss lainnya**

Ambrosius Blarer

Heinrich Bullinger

Yohanes Calvin

William Farel

Yohanes Oecolampadius

### **1618–1648: Perang Tiga Puluh Tahun**

Perang yang merupakan perselisihan antarumat beriman dan sekaligus konflik antarnegara itu berakhir dengan Perdamaian Westfalia. Umat beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan (Lutheran dan Reformasi) dinyatakan berhak sama. →

**Perang Tiga Puluh Tahun** adalah sebuah konflik yang terjadi antara tahun 1618 hingga 1648, khususnya di wilayah yang sekarang menjadi negara Jerman, dan melibatkan sebagian besar kekuatan-kekuatan di kawasan tersebut. Ada beberapa sebab mengapa perang ini terjadi. Meskipun tampak sebagai konflik keagamaan antara kaum Protestan dan Katolik, persaingan antara dinasti Habsburg dan kekuatan lainnya juga merupakan salah satu motif penting terjadinya perang ini, hal ini dapat terlihat dari fakta kaum Katolik Perancis mendukung pihak Protestan, yang meningkatkan persaingan Perancis dan Habsburg.

Akibat dari Perang Tiga Puluh Tahun yang disertai musibah kelaparan dan wabah penyakit sangat mengerikan. Perang mungkin hanya berlangsung 30 tahun, tetapi konflik yang memicunya tetap berlanjut hingga waktu yang lama. Perang ini diakhiri melalui Perjanjian Westphalia.

#### ***Catatan dari teks asli:***

Der **Dreißigjährige Krieg** von 1618 bis 1648 war ein Konflikt um Hegemonie zwischen den Mächten Europas und zugleich ein Religionskrieg. In ihm entluden sich sowohl die Gegensätze zwischen der Katholischen Liga und der Protestantischen Union innerhalb des Heiligen Römischen Reiches als auch der habsburgisch-französische Gegensatz auf europäischer Ebene. Gemeinsam mit ihren jeweiligen Verbündeten im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation trugen die habsburgischen Mächte Österreich und Spanien ihre dynastischen Interessenkonflikte mit Frankreich, den Niederlanden, Dänemark und Schweden aus.

Die Feldzüge und Schlachten fanden überwiegend auf dem Gebiet des Heiligen Römischen Reiches statt. Die Kriegshandlungen selbst, aber auch die durch sie verursachten Hungersnöte und Seuchen verheerten und entvölkerten ganze Landstriche. In Süddeutschland etwa überlebte nur ein Drittel der Bevölkerung. Nach den wirtschaftlichen und sozialen Verheerungen benötigten einige vom Krieg betroffene Territorien mehr als ein Jahrhundert, um sich von dessen Folgen zu erholen. Der Dreißigjährige Krieg endete mit dem Westfälischen Frieden am 24. Oktober 1648.

### **Vorgeschichte und Ursachen**



Der Prager Fenstersturz war ein Auslöser, aber nicht die Ursache des Krieges. Dieses bekannteste Bild des Fenstersturzes ist eine nicht zeitgenössische Darstellung aus dem Theatrum Europaeum.

### **Konfessionelle Gegensätze**

Nach der ersten Phase der Reformation, die Deutschland konfessionell gespalten hatte, versuchten die katholischen und protestantischen Landesherren zunächst eine für beide Seiten akzeptable Verfassungsordnung und ein Mächtegleichgewicht zwischen den Konfessionen im Reich zu finden. Im Augsburger Religionsfrieden vom 25. September 1555 einigten sie sich schließlich auf den Grundsatz *cuius regio, eius religio* (lat. für: wessen Gebiet, dessen Religion; „Herrschaft bestimmt das Bekenntnis“). Seither waren das katholische und das lutherische Glaubensbekenntnis als gleichberechtigt anerkannt, nicht jedoch das reformierte.

Mit der weiteren Ausbreitung der Reformation gegen Ende des 16. Jahrhunderts und dem gleichzeitigen Wiedererstarken des Katholizismus in der Gegenreformation schwand jedoch zunehmend die Bereitschaft zum Kompromiss. Die Protestanten sahen sich insbesondere durch den sogenannten geistlichen Vorbehalt benachteiligt, der ohne ihre Zustimmung, auf Anordnung des Kaisers in den Religionsfrieden eingefügt worden war. Er bestimmte, dass geistliche Territorien vom Grundsatz „cuius regio, eius religio“ ausgenommen sein sollten und geistliche Fürsten, die zum Protestantismus übertraten, ihre Herrschaftsrechte aufgeben mussten. Im Kurfürstentum Köln kam es über diese Frage in den 1580er Jahren sogar zum Krieg (Truchsessischer Krieg). Die Katholiken wiederum beklagten die häufigen Verstöße gegen diese Regelung und verlangten immer nachdrücklicher die Restitution des von protestantischen Landesherren entfremdeten geistlichen Besitzes.

Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts strebte eine – sowohl auf katholischer als auch auf evangelischer Seite – neue Generation von Fürsten danach, mit Gewalt die eigene Position auf Kosten der Gegenseite auszubauen oder verlorenes Terrain zurückzugewinnen. Dazu kam das Bestreben der Calvinisten nach reichsrechtlicher Gleichstellung ihrer Konfession. Verschärft wurde die Lage in Deutschland zu Beginn des 17. Jahrhunderts durch eine Wirtschaftskrise sowie durch dynastische Konflikte, die weit über den konfessionellen Gegensatz hinausgingen.

### **Dynastische Gegensätze**

Seit Beginn des 16. Jahrhunderts versuchte Frankreich, sich aus der Umklammerung durch die habsburgischen Territorien – Spanien, die Niederlande und die Freigrafschaft Burgund – zu lösen. Der habsburgisch-französische Konflikt um die Vorherrschaft überlagerte bis zum 18. Jahrhundert alle anderen Auseinandersetzungen in Europa, so auch den Dreißigjährigen Krieg. Beide Seiten suchten sich dabei ihre Verbündeten auch jenseits konfessioneller Grenzen. So unterstützte das katholische Frankreich die protestantischen Niederlande, die seit 1568 einen Unabhängigkeitskrieg – den so genannten Achtzigjährigen Krieg – gegen die spanische Linie

der Habsburger führten, deren Oberhaupt die römisch-deutsche Kaiserkrone trug. Nach fast 40 Jahren Krieg schlossen Spanien und die Niederlande 1609 einen Waffenstillstand, der aber auf zwölf Jahre befristet war.

### **Verschärfung der Konfliktlage**



Heinrich IV. von Frankreich, Gemälde von Pourbous dem Jüngeren.

Während der erneute Ausbruch des Kampfes um die Niederlande absehbar war, verschärften sich die konfessionellen Gegensätze im Reich: Im Jahr 1608 untersagte der protestantische Rat der Stadt Donauwörth den Katholiken die Ausübung ihres Glaubens. Daraufhin wurde über die Stadt die Reichsacht verhängt. Herzog Maximilian I. von Bayern führte Donauwörth gewaltsam zum katholischen Glauben zurück. Als direkte Reaktion darauf schlossen sich die meisten protestantischen Reichsstände zur Protestantischen Union zusammen, um den Bestrebungen zur Rekatholisierung evangelischer Gebiete entgegenzutreten. Führer der Union war der calvinistische Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz. Die protestantischen Fürsten betrachteten die Union vor allem als Schutzbündnis, das notwendig geworden war, da alle Reichsinstitutionen wie das Reichskammergericht infolge der konfessionellen Gegensätze blockiert waren, und sie den Friedensschutz im Reich nicht mehr als gegeben ansahen.

Im Gegenzug schlossen sich 1609 die katholischen Reichsstände unter der Führung Maximilians I. von Bayern – einem Wittelsbacher wie Friedrich V. – zur Katholischen Liga zusammen. Die Liga wollte das bisherige Reichssystem aufrechterhalten und das Übergewicht des Katholizismus im Reich bewahren.

Konfessionelle und dynastische Spannungen hatten mittlerweile in ganz Europa ein enormes Konfliktpotenzial angehäuft. Diese Spannungen hätten sich beinahe bereits 1610 im Jülich-Klevischen Erbfolgestreit entladen und zum Ausbruch eines großen, gesamteuropäischen Krieges geführt. Vorerst aufgehalten wurde diese Entwicklung durch die Ermordung des französischen Königs Heinrich IV., der die treibende Kraft hinter dem anti-habsburgischen Bündnis gewesen war.

### **Der Ausbruch des Krieges**

Der Auslöser, der zum Ausbruch des großen Krieges führte, war schließlich der Aufstand der mehrheitlich protestantischen böhmischen Stände im Jahr 1618. Im Streit um die Nutzung einer Kirche in dem böhmischen Dorf Braunau hatte der streng katholische, gegenreformatorisch gesinnte österreichische Erzherzog und König von Böhmen Ferdinand II., der 1619 zum Kaiser gewählt werden sollte, den Majestätsbrief widerrufen, der den Protestanten in Böhmen Religionsfreiheit zugesichert hatte.

Gegen diese Maßnahme schritt eine Gruppe protestantischer Adliger im Mai 1618 zu einer in Böhmen traditionellen Form des Protests: Sie warfen die kaiserlichen Räte Martinitz und Wilhelm Slavata sowie einen Sekretär aus dem Fenster der Böhmisches Kanzlei in der Prager Burg. Die Räte überlebten den Fenstersturz, was die protestantische Publizistik später einem







machtpolitischen Gesichtspunkten geführt wurde. Auf dem Gebiet des Heiligen Römischen Reichs bekriegten sich zwei Machtblöcke, die beide von katholischen Mächten geführt wurden: die spanischen und österreichischen Habsburger einerseits und Frankreich andererseits.

Insgesamt folgten in den 30 Jahren von 1618 bis 1648 vier Konflikte aufeinander, die von der Geschichtswissenschaft nach den jeweiligen Gegnern des Kaisers und der Habsburger Mächte als *Böhmisch-Pfälzischer*, *Dänisch-Niedersächsischer*, *Schwedischer* und *Schwedisch-Französischer Krieg* bezeichnet wurden. Zwei Versuche den Konflikt zu beenden, der Friede von Lübeck 1629 und der Friede von Prag 1635 scheiterten daran, dass sie nicht die Interessen aller direkt oder indirekt Beteiligten berücksichtigt hatten. Dies gelang erst dem gesamteuropäischen Friedenskongress von Münster und Osnabrück 1641–1648.

### **Böhmisch-pfälzischer Krieg (1618–1623)**



*Schlacht am Weißen Berg.*

Anfänglich erschien es so, als würden die böhmischen Stände mit ihrem Aufstand erfolgreich sein. Das böhmische Heer unter Heinrich Matthias von Thurn drang in die österreichischen Stammlande der Habsburger ein und stand am 6. Juni 1619 vor Wien. Besonders der mit den Böhmen verbündete Fürst von Siebenbürgen, Bethlen Gábor, machte Kaiser Ferdinand II. schwer zu schaffen. Erst als dem Kaiser im Münchner Vertrag vom 8. Oktober 1619 die Unterstützung Maximilians I. von Bayern versprochen wurde, der protestantische Kurfürst von Sachsen, Johann Georg I., an die Seite des Kaisers trat und die in der Union zusammengeschlossenen protestantischen Reichsstände Friedrich V. von der Pfalz nicht adäquat zu Hilfe kamen (Ulmer Vertrag), wendete sich das Kriegsblatt. In der Schlacht am Weißen Berg wurde das Heer der böhmischen Stände unter Christian I., Fürst von Anhalt-Bernburg, von den kaiserlich-ligistischen Truppen unter Tilly und Karl Bonaventura Graf von Buquoy schwer geschlagen. Nach der Schlacht floh Friedrich aus Böhmen, über ihn wurde die Reichsacht verhängt. Ein Großteil der aufständischen böhmischen Adeligen wurde am 21. Juni 1621 hingerichtet. Schon vorher hatte sich die Protestantische Union aufgelöst.



Herzog Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel, Gemälde von Paulus Moreelse, 1619.

Die noch verbliebenen protestantischen Heerführer Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel, der „*tolle Halberstädter*“ genannt, und Ernst von Mansfeld sowie der Markgraf von Baden Georg Friedrich (Baden-Durlach) setzten den Krieg außerhalb Böhmens fort. In den pfälzischen Erblanden des „Winterkönigs“ konnten die protestantischen Truppen zunächst die Schlacht bei Mingolsheim (27. April 1622) für sich entscheiden. In den folgenden Monaten erlitten sie jedoch schwere Niederlagen. Die badischen Truppen wurden in der Schlacht bei Wimpfen (6. Mai 1622) vernichtend geschlagen, in der Schlacht bei Höchst unterlag Christian von

Braunschweig-Wolfenbüttel. Dieser trat daraufhin mit Ernst von Mansfeld in niederländische Dienste, wohin sich die beiden Heere absetzten. Auf dem Marsch trafen sie auf ein spanisches Heer, welches sie in der Schlacht bei Fleurus (29. August) besiegten. Die Pfalz konnte nicht gehalten werden und Friedrich V. verlor am 23. Februar 1623 die Kurwürde, die auf Maximilian von Bayern übertragen wurde. Christian von Halberstadt erlitt bei Stadtlohn erneut eine verheerende Niederlage und seine dezimierten Truppen waren fortan für die Kaiserlichen kein ernstzunehmender Gegner mehr.

### **Dänisch-niedersächsischer Krieg (1623–1629)**



Zeitgenössische Darstellung der Schlacht bei Lutter

Nachdem die protestantischen Heere im Reich eine Niederlage nach der anderen erlitten hatten, griff nun Christian IV. von Dänemark zu den Waffen. Er drängte die protestantischen Fürsten Norddeutschlands zu einem Bündnis und ließ sich zum Obersten des Niedersächsischen Reichskreises wählen. Mit seinem Verbündeten Ernst von Mansfeld plante er einen Feldzug, der sich zunächst gegen Thüringen und dann gegen Süddeutschland richten sollte. Wie die Böhmen und Friedrich von der Pfalz wartete aber auch Christian vergeblich auf nennenswerte Unterstützung durch andere protestantische Mächte. Zudem sah er sich im Sommer 1626 statt dem einen Heer der Liga noch einer zweiten Armee gegenüber, die der kaiserliche Feldherr Albrecht von Wallenstein aufgestellt hatte. Am 27. August 1626 erlitten die Dänen in der Schlacht bei Lutter am Barenberge eine vernichtende Niederlage gegen Tilly, die sie die Unterstützung ihrer deutschen Verbündeten kostete.

Bereits am 25. April 1626 hatte Wallenstein Christians Verbündeten Ernst von Mansfeld in der Schlacht an der Dessauer Elbbrücke besiegt. Mansfeld gelang es danach noch einmal, ein Heer aufzustellen, mit dem er nach Süden auswich. In Ungarn beabsichtigte er, seine Truppen mit denen Bethlen Gabors zu vereinigen, um anschließend Wien anzugreifen. Doch Wallenstein verfolgte den Söldnerführer und zwang ihn schließlich zur Flucht. Kurz darauf starb Mansfeld in der Nähe von Sarajewo. Im Sommer 1627 stieß Wallenstein in wenigen Wochen nach Norddeutschland und auf die Halbinsel Jütland vor. Nur die dänischen Inseln blieben von den Kaiserlichen unbesetzt, da sie nicht über Schiffe verfügten. 1629 schloss Dänemark den Frieden von Lübeck und schied aus dem Krieg aus.

Die protestantische Sache im Reich schien verloren. Wie 1623 Friedrich von der Pfalz, so wurden nun die mit Dänemark verbündeten Herzöge von Mecklenburg für abgesetzt erklärt. Ihre Landesherrschaft übertrug der Kaiser auf Wallenstein, um damit seine Schulden bei ihm zu begleichen. Gleichfalls 1629 erließ Ferdinand II. das Restitutionsedikt, das die Rückerstattung aller seit 1555 von protestantischen Fürsten eingezogenen geistlichen Besitztümer vorsah. Das Edikt markiert zugleich den Höhepunkt der kaiserlichen Macht im Reich und den Wendepunkt des Krieges, denn es fachte den schon gebrochenen Widerstand der Protestanten erneut an und führte ihnen Verbündete zu, denen Kaiser und Liga am Ende nicht gewachsen waren.

## Schwedischer Krieg (1630–1635)



Gustav II. Adolf wurde in der Schlacht bei Lützen tödlich verwundet.

Nachdem mit Dänemark eine Ostseemacht aus dem Dreißigjährigen Krieg ausgeschieden war, sah Gustav Adolf von Schweden die Chance gekommen, seine hegemonialen Ansprüche in Nordosteuropa durchzusetzen. Er landete mit seiner Armee am 4. Juli 1630 auf Usedom und zwang Pommern, Mecklenburg, Brandenburg und Sachsen zu einem Bündnisvertrag. Am 17. September 1631 trafen die Schweden bei Breitenfeld auf die kaiserlichen Truppen unter Tilly, der noch kurz zuvor die Stadt Magdeburg dem Erdboden gleich gemacht hatte (Magdeburger Hochzeit). Tilly wurde vernichtend geschlagen und konnte auch im folgenden Jahr den Vormarsch der Schweden in Süddeutschland nicht aufhalten. In der Schlacht bei Rain am Lech wurde er verwundet und zog sich nach Ingolstadt zurück, wo er am 30. April an den Folgen der Verwundung starb. Die Schweden versuchten die Stadt einzunehmen, was ihnen jedoch nicht gelang. Diesen Zeitvorsprung nutzte Kurfürst Maximilian, um von Ingolstadt nach Regensburg zu ziehen und es zu besetzen. Die Schweden drangen daraufhin bis München vor und bedrohten Österreich.



Albrecht von Wallenstein wurde auf Befehl des Kaisers 1634 in Eger ermordet.

In dieser für den Kaiser gefährlichen Situation ernannte er den 1630 auf dem Reichstag in Regensburg entlassenen Wallenstein erneut zum Oberbefehlshaber der kaiserlichen Truppen (April 1632). Wallenstein gelang es tatsächlich, Gustav Adolf am 3. September 1632 in der Schlacht an der Alten Veste (bei Nürnberg) Verluste zu bringen. Der schwedische König verlor in der Schlacht bei Lützen am 16. November 1632 das Leben. Die Herrschaft für die noch unmündige Christina von Schweden, Tochter Gustav Adolfs, übernahm Axel Oxenstierna. Dieser schloss mit den Protestanten des fränkischen, schwäbischen und rheinischen Reichskreises den Heilbronner Bund (1633–1634) und führte den Kampf weiter. Sein fähigster Gegner, Albrecht von Wallenstein, wurde am 25. Februar 1634 in Eger ermordet. Im selben Jahr konnten die kaiserlichen Armeen in der Schlacht bei Nördlingen den ersten wirklich großen Sieg über die Schweden unter dem bedeutenden Feldherrn Bernhard von Sachsen-Weimar erringen.



Bernhard von Sachsen-Weimar.

Die protestantischen Reichsstände, zuallererst Kursachsen, brachen im Jahre 1635 aus dem Bündnis mit Schweden aus und schlossen mit Kaiser Ferdinand II. den Prager Frieden, der die Aussetzung des Restitutionsedikts von 1629 für vierzig Jahre beinhaltete. Man beschloss auch, nun gemeinsam gegen die Feinde des Reiches vorzugehen. Der Dreißigjährige Krieg hörte damit endgültig auf, ein Krieg der Konfessionen zu sein, da sich ab 1635 die protestantischen Schweden mit den katholischen Franzosen im Vertrag von Wismar verbanden, um gemeinsam die kaiserliche Macht der Habsburger einzudämmen.

### **Schwedisch-Französischer Krieg (1635–1648)**

In dieser Situation fürchtete Frankreich nun, dass der Konflikt durch einen möglichen Friedensschluss des Reiches mit Schweden zum Vorteil des Kaisers ausgehen würde. Daher entschloss man sich in Paris zum Angriff auf das Reichsgebiet. 13 Jahre dauerten die folgenden, als „Französisch-Schwedischer Krieg“ bezeichneten Kämpfe auf deutschem Boden noch an, ohne dass es eine entscheidende Schlacht und einen militärischen Sieger gab. Ab 1643 verhandelten die Kriegsführenden Parteien – Deutschland, Frankreich und Schweden – in Münster und Osnabrück über einen möglichen Frieden. Die Verhandlungen und Kämpfe dauerten aber noch fünf Jahre an; erst 1648 wurde dann der „Westfälische Frieden“ verkündet. Darin wurde der Augsburger Religionsfrieden von 1555 wiederhergestellt und damit die freie Kirchenwahl festgeschrieben. Zudem wurden dem deutschen Kaiser Rechte entzogen und auf den Reichstag übertragen, die Reichsstände wurden souverän und Europa unter den im Krieg verfeindeten Mächten neu aufgeteilt.

### **Der Westfälische Friede und die Kriegsfolgen**



Die Unterzeichnung des Westfälischen Friedens in Münster 1648; *Gemälde von Gerard ter Borch (um 1648).*

Im Rahmen der Hamburger Präliminarien einigte man sich Ende 1641 schließlich einen allgemeinen Friedenskongress in den Städten Münster (für die Katholiken) und Osnabrück (für die protestantische Seite) abzuhalten. Zuvor war an Köln und später an Lübeck und Hamburg als Kongressorte gedacht worden. Nachdem der Chefunterhändler Graf Maximilian von Trauttmansdorff nach seinem gescheiterten Schlichtungsversuch aus Münster abgereist war, führten Reichshofrat Isaak Volmar und der kaiserliche Gesandte, Graf (später Fürst) Johann Ludwig von Nassau-Hadamar die Friedensverhandlungen endlich zum erfolgreichen Abschluss. Im Westfälischen Frieden wurde neben der katholischen und der lutherischen nun auch die reformierte Konfession im Reich als gleichberechtigt anerkannt. In vier konfessionell gemischten Reichsstädten wurde Parität verordnet, so in Augsburg und Biberach. Umfangreiche Regelungen betrafen die religiösen Streitfragen. Dabei fand man zu teilweise pragmatischen, teilweise auch zu kuriosen Lösungen. So wurde für das Hochstift Osnabrück eine alternierende Regierung von evangelischen Bischöfen (aus dem Hause Braunschweig-Lüneburg) und katholischen Bischöfen geschaffen. Das Fürstbistum Lübeck wurde als einziges evangelisches

Fürstbistum mit Sitz und Stimme im Reichstag erhalten, um das Haus Gottorf mit einer Sekundogenitur zu versorgen. Für die katholischen Klöster in den erloschenen Bistümern Halberstadt und Magdeburg, die ab 1680 an Brandenburg fielen, wurden Sonderregelungen getroffen.

Die neue Großmacht Schweden erhielt 1648 auf Kosten des erbberechtigten Brandenburgs Vorpommern, einschließlich Stettin mit der gesamten Odermündung, die Stadt Wismar samt Neukloster sowie das Erzbistum Bremen mitsamt dem Bistum Verden als Reichslehen.

Dänemark, das die so genannten Elbherzogtümer für sich beanspruchte, wurde übergangen.

Spanien einigte sich mit den Generalstaaten auf eine staatliche Unabhängigkeit. Das Erzherzogtum Österreich trat an Frankreich den Sundgau ab. Eine katholische Hegemonie über das Reich wurde nicht erreicht.



Ein Flugblatt gibt den Friedensschluss zu Münster bekannt, der den Dreißigjährigen Krieg beendet.

Ansonsten änderte sich im Reich vergleichsweise wenig: Das Machtsystem zwischen Kaiser und Reichsständen wurde neu austariert, ohne die Gewichte im Vergleich zur Situation vor dem Krieg stark zu verschieben. Die Reichspolitik wurde nicht entkonfessionalisiert, sondern nur der Umgang der Konfessionen neu geregelt. Frankreich hingegen wurde zum mächtigsten Land Westeuropas. Die Generalstaaten und die Eidgenossenschaft schieden aus dem Reichsverbund aus, was im Fall der Eidgenossenschaft jedoch nur die De-jure-Feststellung eines de facto seit Ende des Schwabenkrieges von 1499 feststehenden Umstandes war.

Noch offen gebliebene Fragen, insbesondere zum Thema Truppenabzug, wurden in den Folgemonaten im Friedensexekutionskongress in Nürnberg geklärt.

Teile des deutschen Reichs waren stark verwüstet worden. Nach heutigen Erkenntnissen kostete der Krieg etwa drei bis vier Millionen Menschenleben bei einer Gesamtbevölkerung im Reichsgebiet von rund 17 Millionen. Die meisten Opfer forderten die Seuchen ab 1634.

Zu den Gewinnern des Konfliktes zählte unter anderem die Stadt Hamburg, deren Ziel der Anerkennung ihrer Reichsstandschaft zwar nicht erfüllt wurde, die jedoch große Teile des Handels mit Mitteldeutschland auf sich konzentrieren konnte. Für die großen oberdeutschen Handelsmetropolen beschleunigte der Krieg noch einmal die Abschwungphase des ausgehenden 16. Jahrhunderts.

Wenig beachtet, aber von großem Schaden, war, dass mit der Unabhängigkeit der Niederlande und dem Verlust wichtiger Küstenregionen und Ostseehäfen an Schweden praktisch alle großen Flussmündungen unter fremdem Einfluss standen. Die deutschen Staaten hatten kaum Zugang zur Hohen See und waren damit weitgehend vom überseeischen Handel ausgeschlossen. Deutschland hatte damit nicht nur den Einfluss über seine eigenen Geschicke an die umgebenden Mächte verloren, es war auch wirtschaftlich von den Chancen abgeschnitten, die der Seehandel und der Erwerb von Kolonien anderen Nationen wie England, Schweden und den Niederlanden eröffnete.



Frankreich, England, Schweden und die Niederlande konnten sich nach dem Dreißigjährigen Krieg zu Nationalstaaten entwickeln. Mit dem aufblühenden Handel ging in diesen Ländern ein Aufschwung des liberalen Bürgertums einher, dessen Ausbleiben für Deutschland kaum ermessliche geschichtliche und gesellschaftliche Folgen hatte. Das Reich bildete weiterhin einen lockeren Verbund von Fürstentümern. Wenn dieser Verbund zum wesentlichen Friedensfaktor im Europa der nächsten 150 Jahre wurde, so geschah das auch auf Kosten der wirtschaftlichen Chancen Deutschlands.

### **Die Finanzierung des Krieges**

Die frühmodernen Staaten Europas verfügten zu Beginn des 17. Jahrhunderts weder in finanzieller noch in administrativer Hinsicht über Strukturen, die effizient genug gewesen wären, um stehende Heere von der Größe zu unterhalten, wie sie der Dreißigjährige Krieg erforderlich machte. Die Finanzierung der riesigen Söldnerarmeen stürzte daher alle Kriegsparteien in ständige Geldnot, ganz besonders die deutschen Fürsten, deren Territorien aufgrund der Länge und Intensität des Konflikts schon bald weitgehend ausgeblutet waren.

Die vermeintliche Lösung beschrieb die Parole „Der Krieg ernährt den Krieg“. Die Heere trieben in den von ihnen durchstreiften Gebieten Abgaben und Kontributionen in Form von Geld und Naturalleistungen ein. Das heißt: Das Land, in dem gerade gekämpft oder das besetzt wurde, musste für die Kriegskosten aufkommen. Dabei achteten die Feldherren darauf, möglichst die Gebiete gegnerischer Parteien zu belasten. Je länger der Krieg dauerte, desto mehr wuchs sich diese Praxis zu willkürlicher Plünderung mit allen Begleiterscheinungen von Raub und Mord aus. Wallenstein wird die Äußerung zugeschrieben, dass sich ein großes Heer leichter finanzieren lasse als ein kleines, da es auf die Zivilbevölkerung stärker Druck ausüben könne.

Halbwegs regelmäßig besoldete Truppen wie die Wallensteins oder Gustav Adolfs gingen bei der Eintreibung von Geld und Material – zumindest in den ersten Kriegsjahren – disziplinierter vor als die freien Söldnertruppen, die sich je nach Kriegslage mal der einen, mal der anderen Partei anschlossen. Ihnen gehörten Söldner aus nahezu allen Ländern Europas an.

Gustav Adolf befahl zu Anfang ein relativ homogenes Heer aus überwiegend schwedischen und finnischen Soldaten. Dies und der gemeinsame lutherische Glaube, für den sie zu kämpfen bereit waren, stärkte die Disziplin und den Zusammenhalt. Zum Erfolg der schwedischen Truppen trugen schließlich ihre überlegene Feuerkraft und die bewegliche Taktik bei. Doch nach dem Tod Gustav Adolfs wurden gerade die schwedischen Truppen zum Schrecken der Bevölkerung.

### **Rezeptionsgeschichte**



Zeitgenössische „Geschichte“ des Dreißigjährigen Krieges 1647



### **Der Krieg in der kollektiven Erinnerung und in der Literatur**

Der Historiker Friedrich Oertel schrieb 1947 über die Auswirkungen Dreißigjährigen Krieges auf den deutschen Nationalcharakter: „Deutsche Eigenschaften bleiben allerdings das mangelnde Gefühl für die ‚liberalitas‘ des von innen her souveränen Menschen und das mangelnde Gefühl für ‚dignitas‘. Die Nachwirkungen des 30-jährigen Krieges lasten eben noch in tragischer Weise auf der Geschichte unseres Volkes und haben den Reifeprozess aufgehalten. Wann werden die Schatten endlich weichen, wird das Versäumte nachgeholt sein?“<sup>[2]</sup>

Der Dreißigjährige Krieg hat vielfältige Spuren in Kunst und Alltagsleben hinterlassen – von einfachen Kinderreimen wie *Bet’, Kindchen, bet’, morgen kommt der Schwed’* bis zu großen Werken der Dichtkunst.

In seinem Schelmenroman *Der abenteuerliche Simplicissimus*, erschienen 1669, schilderte Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1625–1676) die Wirren und Gräueltaten des Krieges und schuf damit den ersten bedeutenden Roman der deutschen Literatur. Einen Augenzeugenbericht hat der Söldner Peter Hagedorn in seiner Chronik hinterlassen.

Das Erlebnis von nicht enden wollendem Krieg, Hunger, Krankheiten und allgemeiner Zerstörung ließ eine Lyrik von bis dahin nicht gekannter Eindringlichkeit entstehen, in der sich die Gewissheit von Tod und Vergänglichkeit mit barocker Lebensgier verband. So schrieb Andreas Gryphius das Sonett „Tränen des Vaterlandes Anno 1636“, das bis heute zu den meist zitierten Antikriegsgedichten zählt. Es beginnt mit den Versen:

*Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret!  
Der frechen Völker Schar, die rasende Posaun  
Das vom Blut fette Schwert, die donnernde Kartaun,  
Hat aller Schweiß und Fleiß und Vorrat aufgezehret.*

Der als Volksheld und Retter in der Not gefeierte Martin Rinckart verfasste „Nun danket alle Gott“, und dem Leipziger Zeitzeugen Gregor Ritzsch verdanken wir „Ich hab den Schweden mit Augen gesehen; er tat mir wohl gefallen.“

Im 18. Jahrhundert beschäftigte sich Friedrich Schiller als Historiker und Dramatiker mit dem Krieg. 1792 veröffentlichte er eine in weiten Teilen noch heute gültige „Geschichte des Dreißigjährigen Krieges“. Sieben Jahre später vollendete er sein dreiteiliges Drama „Wallenstein“.

Mit wachsendem zeitlichem Abstand sahen Schriftsteller in dem großen Konflikt des 17. Jahrhunderts zunehmend eine Metapher für die Schrecken des Krieges überhaupt. Das bekannteste Beispiel dafür aus dem 20. Jahrhundert ist Bertolt Brechts Stück „Mutter Courage und ihre Kinder“, das im Dreißigjährigen Krieg angesiedelt ist, aber deutlich macht, dass die Verrohung und Zerstörung des Menschen durch die Gewalt überall und zu jeder Zeit möglich ist.

### **Der Begriff „Dreißigjähriger Krieg“**

Verschiedene Konzeptionen und Herangehensweisen in der Geschichtswissenschaft führten nach dem Zweiten Weltkrieg dazu, dass der Begriff „Dreißigjähriger Krieg“ grundsätzlich infrage gestellt wurde. Im Jahre 1947 wandte sich der Historiker Sigfrid Heinrich Steinberg in einem Aufsatz für die englische Fachzeitschrift *History* erstmals gegen seine Verwendung.<sup>[3]</sup> Später, im Jahre 1966, kam er in *The Thirty Years War and the Conflict for European Hegemony 1600–1660* zu dem Schluss, es handele sich bei dem Begriff lediglich um ein „Produkt rückschauender Phantasie“.<sup>[4]</sup> Demnach „benutzte weder Pufendorf, noch irgendein anderer Zeitgenosse den Ausdruck ‚Dreißigjähriger Krieg‘.“<sup>[5]</sup>

Gegen diese Aussage wandten sich zunächst nur vereinzelt andere Historiker.<sup>[6]</sup> Schließlich aber widerlegte der deutsche Historiker Konrad Repgen Steinbergs These, zunächst in einigen Artikeln, später in einem umfangreichen Aufsatz. Er wies anhand zahlreicher Quellen nach, dass der Begriff „Dreißigjähriger Krieg“ schon um die Zeit des Westfälischen Friedens entstanden war. Die Zeitzeugen hätten dabei vom Anfang des Krieges an dessen Dauer in Jahren angegeben; die humanistischen Gelehrten seien zudem durch das Vorbild antiker Schriftsteller

inspiriert worden. Die Benennung führte Reggen auch auf das Bedürfnis der Zeitgenossen zurück, der gänzlich neuen Erfahrung Ausdruck zu verleihen, die der Krieg für sie dargestellt habe.<sup>[17]</sup> Diese Interpretation wurde von anderen Historikern weitgehend übernommen.

Johannes Burkhardt wies gleichwohl darauf hin, dass der Begriff, obwohl zeitgenössisch, dennoch ein Konstrukt bezeichnen können, da es sich beim Dreißigjährigen Krieg in Wirklichkeit um eine Vielzahl paralleler und aufeinander folgender Kriege gehandelt habe. Er führte den Namen darauf zurück, dass die „Kriegsverdichtung“ solche Ausmaße angenommen habe, dass es für die Zeitgenossen fast unmöglich gewesen sei, zwischen den einzelnen Konflikten zu unterscheiden.<sup>[18]</sup> Diese Annahme stützte 1999 eine Studie von Geoffrey Mortimer über zeitgenössische Tagebücher.<sup>[19]</sup> Andere Historiker folgen bis heute der Tradition Steinbergs, den „Dreißigjährigen Krieg“ als eine nachträgliche Konstruktion deutscher Historiker zu betrachten.<sup>[10]</sup>

## Literatur

### Gesamtdarstellung

- Günter Barudio: *Der Teutsche Krieg 1618-1648*, Frankfurt/Main 1985
- Friedemann Bedürftig: *Taschenlexikon Dreißigjähriger Krieg*, Taschenbuch, 261 Seiten, Piper 1998
- Johannes Burkhardt: *Der Dreißigjährige Krieg*, Frankfurt/Main 1992
- Peter Milger: *Gegen Land und Leute - Der Dreißigjährige Krieg, Ursachen, Verlauf und Folgen, erzählt anhand von teilweise unveröffentlichten Bildern, Augenzeugenberichten und Dokumenten*, München 1998
- Geoffrey Parker: *Der Dreißigjährige Krieg*. Aus dem Englischen übersetzt von Udo Rennert. Campus, Frankfurt am Main 1991. ISBN 3-593-34419-X
- Georg Schmidt: *Der Dreißigjährige Krieg*, 6. Aufl., München: Beck 2003, ISBN 3-406-49034-4
- Gerhard Schormann: *Dreißigjähriger Krieg. 1618-1648*, Stuttgart 2001
- Cicely Veronica Wedgwood: *Der 30jährige Krieg*, München 1967

### Ursache

- N. M. Sutherland: *The Origins of the Thirty Years War and the Structure of European Politics*, In: *English Historical Review* 107 (1992), S. 587–625 [Sutherland kritisiert die teilweise eindimensionale Betrachtung des Dreißigjährigen Krieges als primär deutschen Krieges.]

### Friedensschluss

- Klaus Bußmann und Heinz Schilling (Hg.): *1648 – Krieg und Frieden in Europa*, Katalogband und zwei Textbände, Münster 1998 [Dokumentation der Europaratsausstellung zum 350-jährigen Jubiläum des Westfälischen Friedens in Münster und Osnabrück.]
- Fritz Dickmann: *Der Westfälische Friede*, Münster 1965
- Heinz Duchhardt (Hg.): *Der Westfälische Friede*. Diplomatie, politische Zäsur, kulturelles Umfeld, Rezeptionsgeschichte, München 1998
- Ernst Höfer: *Das Ende des Dreißigjährigen Krieges. Strategie und Kriegsbild*, Köln/Weimar/Wien 1997

### Militär

- Gustav Freytag: *Der Dreißigjährige Krieg 1618-1648 - Das Heer. Soldatenleben und Sitten*, Band 1, Verlag Rockstuhl, Bad Langensalza, 2003, ISBN 3-937135-03-0
- Bernhard Kroener und Ralf Proeve (Hg.): *Krieg und Frieden. Militär und Gesellschaft in der Frühen Neuzeit*, Paderborn 1996
- Julia Zunckel: *Rüstungsgeschäfte im Dreißigjährigen Krieg*. Unternehmerkräfte, Militärgüter und Marktstrategien im Handel zwischen Genua, Amsterdam und Hamburg (Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 49), Berlin 1997

### Wirtschafts- und Sozialgeschichte

- Jörg-Peter Findeisen: *Der Dreißigjährige Krieg. Eine Epoche in Lebensbildern*, Graz/Wien/Köln 1998
- Gustav Freytag: *Der Dreißigjährige Krieg 1618-1648 - Die Städte. Die Kipper und Wipper und die öffentliche Meinung*, Band 2, Verlag Rockstuhl, Bad Langensalza, 2003, [ISBN 3-937135-04-9](#)
- Gustav Freytag: *Der Dreißigjährige Krieg 1618-1648 - Die Dörfer und ihre Geistlichen. Der Frieden*, Band 3, Verlag Rockstuhl, Bad Langensalza, 2003, [ISBN 3-929000-56-3](#)
- Benigna von Krusenstjern, Hans Medick (Hg.): *Zwischen Alltag und Katastrophe. Der Dreißigjährige Krieg aus der Nähe*, Göttingen 1999
- Markus Meumann, Dirk Niefanger (Hg.): *Ein Schauplatz herber Angst. Wahrnehmung und Darstellung von Gewalt im 17. Jahrhundert*, Göttingen 1997

#### Kulturgeschichte

- Herbert Langer: *Der Dreißigjährige Krieg. Hortus Bellicus. Eine Kulturgeschichte*, Gütersloh 1982.

#### Lokalgeschichte

- Matthias Asche: *Neusiedler im verheerten Land - Kriegsfolgenbewältigung, Migrationssteuerung und Konfessionspolitik in Zeichen des Landeswiederaufbaus - Die Mark Brandenburg nach den Kriegen des 17. Jahrhunderts*, Aschendorff Verlag GmbH & Co. KG, Münster 2006, [ISBN 3-402-00417-8](#)
- Martin Bötzing: *Leben und Leiden während des Dreißigjährigen Krieges in Thüringen und Franken (1618-1648) - Ein Augenzeugenbericht*, Verlag Rockstuhl, Bad Langensalza, 2001, [ISBN 3-929000-39-3](#)
- Peter Engerisser: *Von Kronach nach Nördlingen – Der Dreißigjährige Krieg in Franken, Schwaben und der Oberpfalz 1631–1635*, Verlag Heinz Späthling 2004, [ISBN 3-926621-32-X](#), [mit mehr als 120 Kurzbiographien]
- Jan N. Lorenzen: *1631 - Die Zerstörung Magdeburgs*, in: ders.: *Die großen Schlachten. Mythen, Menschen, Schicksale*, Campus Verlag, Frankfurt 2006, Seiten 55-100, [ISBN 3-593-38122-2](#)
- Hans Pehle: *Der Rheinübergang des Schwedenkönigs Gustav II. Adolf*; Riedstadt (Forum Verlag)
- Stolch, Axel und Wöllper, Jörg: *Die Schweden auf dem Breitwang. Ein Beitrag zur Geschichte der Stadt Bopfingen und der Schlacht bei Nördlingen im Jahre 1634*. Heimat- und Fachverlag F. Steinmeier, Nördlingen 2009, [ISBN 978-3-936363-47-0](#)

#### Einzelpersonen

- Golo Mann: *Wallenstein*, Frankfurt am Main 1971 [Erzählende Biografie des kaiserlichen Feldherrn]
- Ilja Mieck: *Wallenstein 1634. Mord oder Hinrichtung?* in Demandt, Alexander (Hrsg.) *Das Attentat in der Geschichte*, Suhrkamp Taschenbuch Verlag, Frankfurt a. M., 1999
- Leopold von Ranke: *Geschichte Wallensteins*, Nachdr., Kronberg/Ts. 1978, [ISBN 3-7610-7211-2](#)
- Günter Barudio: *Gustav Adolf der Große. Eine politische Biographie*, Frankfurt/Main 1985

#### Historische Betrachtung

- Friedrich Schiller: *Die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges*, München 1988 [erstmalig erschienen 1792]
- Friedrich Schiller: *Wallenstein*, bei Reclam, Ditzingen, 2003, Erstausgabe 1800

#### Fernseh-Dokumentation

- Peter Milger: *Gegen Land und Leute. Der Dreißigjährige Krieg*. ARD/hr 1998; Gebundene Ausgabe zum Film, 335 Seiten, Orbis Verlag München, 2001
- Hans-Christian Huf: *Mit Gottes Segen in die Hölle. Der Dreißigjährige Krieg*. ZDF, Gebundene Ausgabe zum Film, 320 Seiten, Econ, München 2003

Magazine

- *Der Dreissigjährige Krieg*. Geoepoche Nr. 29/2008.

Belletristische Darstellungen

- Alfred Döblin: *Wallenstein*, bei DTV, Juni 2003, Erstausgabe 1920, expressionistischer Roman
- Ricarda Huch: *Der Dreißigjährige Krieg* (Erstausgabe hieß: *Der große Krieg in Deutschland*), Erstausgabe 1912–1914 in 3 Bänden, historischer Roman
- Tilman Röhrig: *In 300 Jahren vielleicht*, Arena-Verlag, Würzburg, ISBN 3-401-01850-7
- Bertolt Brecht: *Mutter Courage und ihre Kinder* 1939 - Der Zerfall einer Familie im 30-jährigen Krieg